



Pengaruh Kolapsnya Kurs Baht Thailand Terhadap Krisis Mata Uang di Asia 1997

Annisa Dwi Kurnia*, Layla Novitasari, Rifa Siti Nurhaliza, Sylvania Mukjizati, Yasmin Syahputri

Universitas Pendidikan Indonesia

*Correspondence: E-mail: annisadwkm@upi.edu

ABSTRACT

Jatuhnya Baht Thailand ini disebabkan oleh ulah para spekulasi. Selain itu, depresiasi Baht Thailand juga dipicu oleh penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa yang membuat terjadinya peningkatan arus kapital yang masuk ke Asia antara tahun 1990 – 1996.. Jatuhnya nilai Baht Thailand pada tahun 1997 menjadi awal dari momentum krisis finansial di negara-negara Asia. Pada mulanya krisis ini hanya dianggap sebagai krisis mata uang. Namun, lama kelamaan diikuti dengan krisis keuangan pada lembaga-lembaga non-bank yang harus ditutup karena mengalami kebangkrutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya krisis mata uang Asia yang disebabkan oleh anjloknya kurs Baht Thailand dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani anjloknya kurs Baht Thailand. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kepustakaan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Thailand dan bantuan IMF mampu untuk mengatasi masalah krisis dengan cara menerapkan kebijakan *Austerity Fiscal* dan penerapan *Letter of Intent* (LoI).

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 04 July 2022

First Revised 09 Aug 2022

Accepted 02 Sept 2022

First Available online 03 Sept 2022

Publication Date 1 Oct 2022

Keyword:

Baht,
Krisis Asia,
Kurs,
Thailand.

1. INTRODUCTION

Krisis moneter pada tahun 1997 berawal dari maraknya “*hot money bubble*” atau gelembung uang panas. Uang panas ini merupakan dana yang pengelolaannya bersifat untung-untungan dan dapat memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Uang panas ini dapat menarik perhatian investor untuk mengunci suku bunga jangka pendek dengan bunga tertinggi. Adanya *hot money bubble* tersebut membantu banyak negara-negara di Asia dalam meningkatkan pertumbuhannya, karena banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi. Pada tahun 1980 hingga 1990, terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di Asia sebanyak 8-12%. Namun, *hot money bubble* ini memberikan dampak yang sangat besar dan pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi di negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara (Yilmaz, 2000).

Pertumbuhan ekonomi di Asia pada tahun 1990-an didorong oleh ekspor dan investasi asing. Bersama dengan hal tersebut, Amerika Serikat kembali pulih dari resesinya, sehingga suku bunga Amerika Serikat kembali naik, menyebabkan *hot money bubble* beralih ke pasar Amerika Serikat, yang pada akhirnya memperkuat nilai tukar dollar AS. Akibatnya, pertumbuhan ekspor menjadi terhambat dan investasi asing mulai berkurang karena para investor yang pada awalnya berinvestasi di negara-negara berkembang Asia, mulai panik dan berhenti berinvestasi ketika melihat jatuhnya mata uang negara-negara Asia. Hal tersebut menimbulkan krisis ekonomi dimana-mana (Yilmaz, 2000).

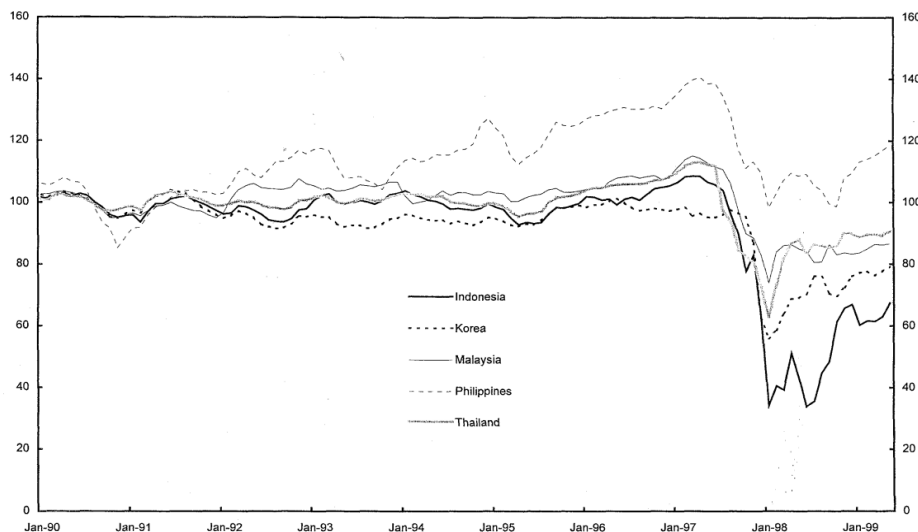


Figure 1. Asian Crisis Countries: Real Effective Exchange Rate (1990 = 100)

Sumber: (Berg, 1999)

Krisis moneter di Asia berawal dari Thailand, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1997. Nilai mata uang Baht mengalami depresiasi, dan utang luar negeri Thailand menumpuk semakin banyak. Krisis keuangan di Thailand tersebut membawakan wabah kepada banyak negara, terutama pada negara yang ada di Asia tenggara sendiri, diantaranya negara pertama yang terkena dampaknya adalah adalah pada Filipina, Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1.75% pada Mei 1997 dan 2 Persen lagi pada 19 Juni 1997. Pada tanggal 3 Juli, Bank sentral Filipina dipaksa IMF untuk menaikkan suku bunga dari 15% hingga 24% dalam waktu yang sangat cepat (**Figure 1**).

Korea Selatan juga turut menerima imbas krisis Thailand. Meski perekonomian Korea Selatan sangat baik, namun sektor perbankan dibebani kredit macet luar biasa. Angka *Non Performing Loan* (NPL) sangat tinggi dan mengakibatkan banyak perusahaan di Korea Utara mengalami kerugian pada nilai saham. Bursa efek Korea Selatan jatuh sebesar 4% pada 7

November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh kembali hingga mencapai angka 7%, penurunan terbesar sepanjang sejarah negara tersebut.

Malaysia pun terkena dampak dari krisis Thailand, negara ini mengalami defisit anggaran hingga 6%. pada bulan Juli 1997, ringgit Malaysia diserang oleh para spekulator. Pemerintah Malaysia mengambil kebijakan *floating exchange rate*, namun akibat dari kebijakan tersebut malah membuat ringgit Malaysia anjlok secara drastis pada 17 Agustus 1997. Produk Domestik Bruto (PDB) di Malaysia mengalami penurunan sebesar 6.2%.

Indonesia juga merupakan negara yang terkena dampak krisis Thailand. Pada Juni 1997, ketika krisis melanda Thailand, penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand yang tercatat pada awal 1997 nilai rupiah stabil di kisaran Rp 2000-2300/US\$ lalu terjungkal tajam hingga lebih dari Rp10.000/US\$ dalam waktu satu tahun. Persoalan perbankan dan utang swasta ke luar negeri yang sangat besar penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pada akhir tahun 1997, nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap dolar AS, sehingga harga-harga barang menjadi naik drastis. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka. Rasa kepercayaan internasional terhadap Indonesia pun ikut menurun sehingga perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negerinya saat jatuh tempo.

2. METHODS

Dalam penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Menurut Mestika Zed (2008), studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Studi kepastakaan juga dapat mengkaji beberapa buku referensi dan hasil penelitian serupa sebelumnya yang berguna untuk memperoleh landasan teori mengenai masalah yang diteliti (Sarwono, 2006). Studi kepastakaan juga mengacu pada teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah buku, literatur, arsip, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Sedangkan menurut Sugiyono (2012), studi kepastakaan adalah kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang terbentuk dalam situasi sosial yang diteliti.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3. RESULT AND DISCUSSION

Proses Terjadinya Krisis Mata Uang Asia yang Disebabkan oleh Anjloknya Kurs Baht Thailand

Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan dengan stabil dimana memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilitasnya perekonomian Thailand pada masa itu mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Karena stabilitasnya perekonomian Thailand secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, sampailah masa jatuh tempo pembayaran utang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada masa itu banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar hutangnya, maka timbulah ketidakpercayaan di kalangan

perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Ketidakpercayaan perbankan Jepang ini disebabkan oleh adanya *moral hazard* karena Thailand mengambil proyek-proyek yang beresiko tinggi sehingga Jepang sebagai pihak peminjam khawatir jika Thailand tidak mampu untuk mengembalikan kredit yang mereka pinjam (Aziza et al., 2019). Kekhawatiran Jepang ini sejalan dengan teori Mundell-Fleming dimana ketika investor berekspektasi bahwa nilai tukar mata uang suatu negara akan turun maka investasi pada mata uang negara tersebut akan dikembalikan dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan mata uang negara lain. Oleh sebab itu, beberapa bank Jepang pun akhirnya mempercepat jatuh tempo pembayaran utang.

Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan utang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang anjlok, akhirnya membuat pasar modal Thailand pun ikut anjlok hingga 75%. Setelah itu, dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997 yang dikenal dengan *Finance One* (perusahaan keuangan terbesar di Thailand) ikut mengalami kebangkrutan. Selain itu, krisis ini juga mengakibatkan uang Baht Thailand pada tahun 1997 mengalami depresiasi.

Depresiasi Baht Thailand ini diakibatkan oleh ulah para spekulan. Pada saat itu spekulan menjual mata uang Baht dengan harapan dapat menurunkan harga Baht yang berharga 26 Baht per 1 Dollar Amerika. Pada akhirnya keinginan para spekulan tersebut berhasil. Karena banyak Baht yang keluar, maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang Bath dan menghabiskan cadangan devisa sebesar USD 6,8 juta. Pada Januari 1998, harga Baht jatuh dengan harga 54 Baht per Dollar Amerika (Leightne, 2007). Selain itu, depresiasi Baht Thailand juga dipicu oleh adanya penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa yang membuat terjadinya peningkatan tajam arus kapital yang masuk di Asia antara tahun 1990 hingga 1996 (Fatimah, 2008). Thailand yang menerima arus portfolio tinggi juga mulai kehilangan momentum ekspor sehingga defisit dalam *balance of payment* mengakibatkan depresiasi drastis nilai Baht pada tahun 1997.

Jatuhnya nilai Baht Thailand pada tahun 1997 menjadi awal dari momentum krisis finansial di negara-negara Asia. Awal mulanya hanya dianggap sebagai krisis mata uang. Namun, lama-kelamaan menyebabkan 58 lembaga keuangan non-bank harus menutup operasinya karena bangkrut. Krisis Asia ini kemudian dikenal dengan sebutan "*Tom Yum Effect*", yang telah membawa wabah terhadap jatuhnya mata uang, serta melemahnya pasar modal di negara-negara tetangganya. Selain itu, kegagalan Thailand dalam membayar pinjaman kreditnya, menyebabkan para investor ikut kehilangan kepercayaan kepada negara-negara di Asia. Sehingga para investor juga ikut menarik investasinya dan berhenti memberikan pinjaman kepada negara-negara Asia seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina (Mahmudy, 2003).

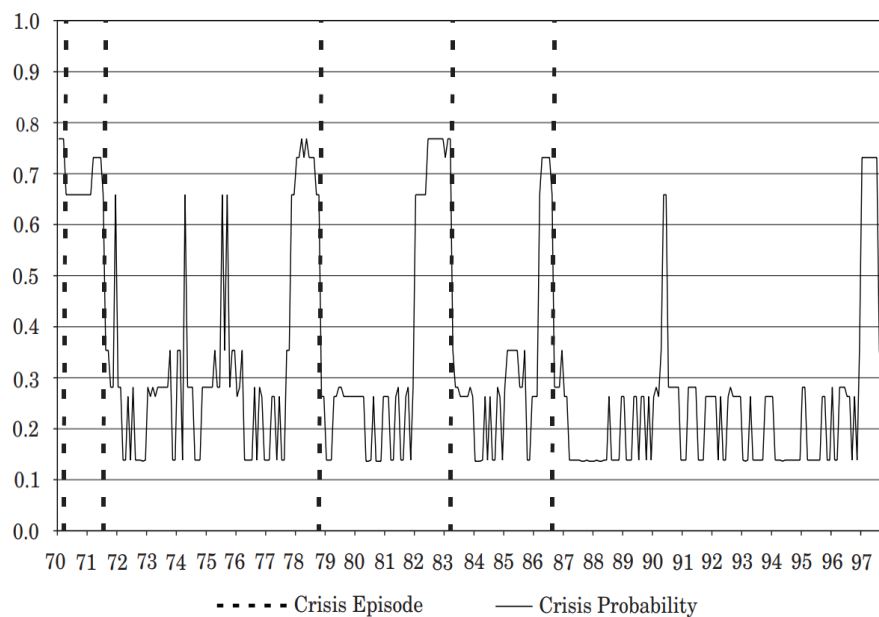


Figure 1. Indonesia: Currency Crisis and Probability of Currency Crisis 1970-1995 (in-sample), 1996-1997 (out sample)

Sumber: (Zhuang & Dowling, 2002)

Dalam **Figure 1** menunjukkan bahwa ketika Baht Thailand terdepresiasi sebesar 19,6% maka di Indonesia kemungkinan untuk krisis tetap rendah selama tahun 1987-1996. Namun, mulai meningkat sejak awal tahun 1997, dan bertahan lebih dari 70% selama tujuh bulan berturut-turut sebelum rupiah terdepresiasi sebesar 21,5%. Pada Juni 1997, Indonesia mulai mengalami pengaruh krisis Thailand. Tercatat di awal 1997 nilai rupiah stabil di kisaran Rp 2.000-2.300/US\$ lalu meningkat tajam hingga lebih dari Rp 10.000/US\$ dalam waktu satu tahun. Dari hal itu, diketahui pula bahwa utang korporasi swasta di Indonesia mencapai US\$75 miliar. Selain itu, sistem perbankan di Indonesia juga dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari US\$900 juta, dan juga cadangan devisa lebih dari US\$20 miliar. Meskipun Indonesia sudah mendapat bantuan dari IMF namun tetap saja rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US\$ yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah secara besar-besaran. Krisis yang melanda Indonesia 1997 tidak hanya krisis keuangan Asia, akan tetapi Indonesia juga dilanda krisis mata uang atau *currency crisis* dan krisis perbankan atau *banking crisis*. Dampak krisis mata uang ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Penurunan nilai tukar rupiah yang semakin tajam ini disertai pula dengan pemutusan akses peminjaman modal dari luar negeri. Hal ini menyebabkan komoditas produksi dan kesempatan kerja semakin sedikit. Akibatnya, produk domestik lebih mahal dibandingkan barang luar negeri, sehingga masyarakat cenderung bergantung terhadap produk impor. Selain itu, depresiasi rupiah juga menyebabkan laju inflasi pada tahun 1997 mencapai angka 45,5%.

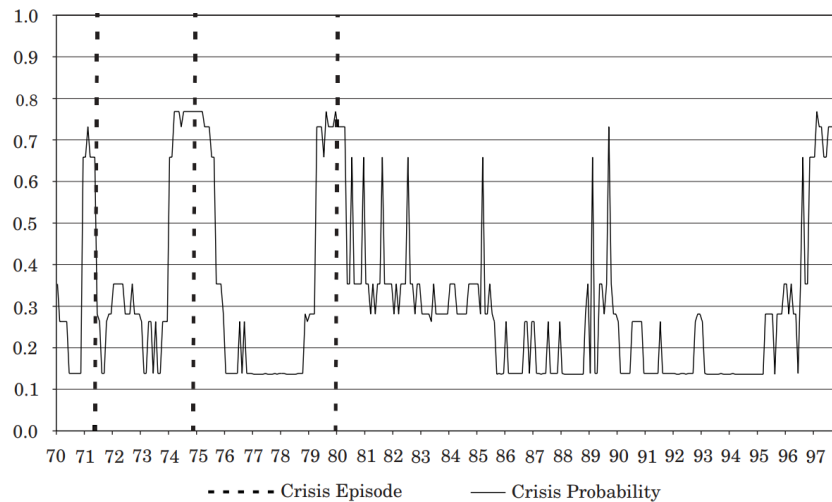


Figure 2. Korea: Currency Crisis and Probability of Currency Crisis 1970-1995 (in-sample), 1996-1997 (out sample)

Sumber: (Zhuang & Dowling, 2002)

Dalam **figure 2** menunjukkan bahwa ketika Baht Thailand terdepresiasi sebesar 19,6% maka di Korea kemungkinan untuk krisis tetap pada angka di bawah 20% selama tahun 1990-1995. Namun, krisis ini mulai meningkat pada awal tahun 1996, dan terus meningkat lebih dari 70% hingga November 1997 tepatnya ketika won Korea terdepresiasi sebesar 17%. Korea Selatan yang menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-11 dunia, turut menerima imbas krisis Thailand. Meskipun, fundamental ekonomi makro Korea Selatan sangat baik, namun sektor perbankannya dibebani kredit macet yang luar biasa. Para investor asing yang kehilangan minat pada pasar Korea Selatan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps dan nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga ikut anjlok. Angka *Non Performing Loan* atau NPL yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan di Korea Selatan mengalami jatuhnya nilai saham dan diambil alih oleh perusahaan lain. Contohnya pada Juli 1997, Kia Motors yang dikenal sebagai produsen mobil terbesar ketiga di Korea, terpaksa meminta pinjaman darurat kepada perbankan. Bursa efek Korea Selatan jatuh sebesar 4% pada 7 November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh kembali hingga mencapai angka 7%, hal itu merupakan penurunan terbesar sepanjang sejarah Korea Selatan. Pada 24 November, pasar modal jatuh lagi hingga 7,2% karena adanya kekhawatiran IMF akan meminta reformasi yang membebani ekonomi Korea Selatan. Peringkat kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A3 pada 28 November 1997, dan turun lagi menjadi B2 pada 11 Desember. Pada tahun 1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors.

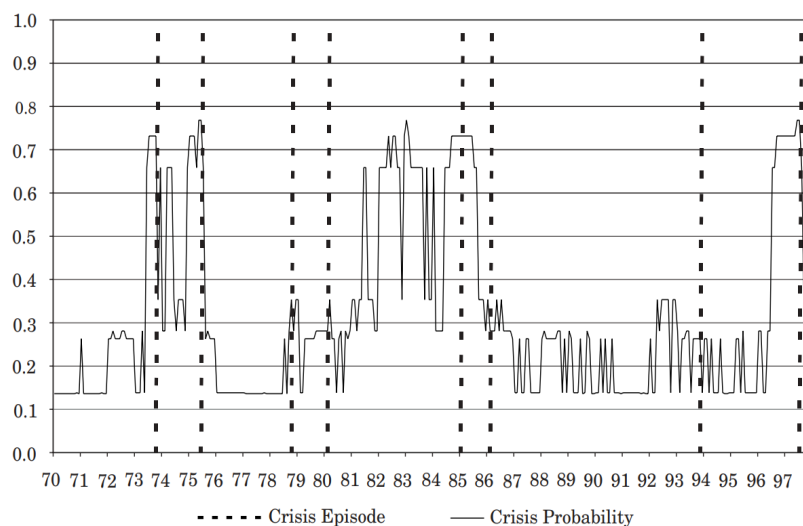


Figure 3. *Malaysia: Currency Crisis and Probability of Currency Crisis 1970-1995 (in-sample), 1996-1997 (out sample)*
 Sumber: (Zhuang & Dowling, 2002)

Dalam **figure 3** menunjukkan bahwa ketika Baht Thailand terdepresiasi sebesar 19,6% maka di Malaysia kemungkinan krisis juga meningkat secara dramatis dari pertengahan tahun 1996 dan mencapai lebih dari 70% akhir tahun itu dan bertahan di atas level ini sampai ringgit Malaysia terdepresiasi sebesar 11,1% pada bulan Agustus 1997. Malaysia mengalami defisit anggaran hingga 6%. Pada bulan Juli 1997, ringgit Malaysia diserang oleh para spekulator. Untuk menghadapi serangan tersebut, pemerintah Malaysia mengambil kebijakan mata uang mengambang atau *floating exchange rate*, namun ternyata kebijakan ini malah membuat ringgit Malaysia anjlok secara drastis pada 17 Agustus 1997. Empat hari kemudian *Standard and Poor's* menurunkan peringkat utang Malaysia. Seminggu kemudian, peringkat Maybank pun ikut turun, padahal Maybank adalah bank terbesar di Malaysia. Di hari yang sama, bursa efek Kuala Lumpur jatuh 856 poin, dan menjadi titik terendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit kembali anjlok dan membuat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad harus mengambil kebijakan. Meski demikian, mata uang ringgit tetap saja jatuh lagi pada akhir 1997 ketika Mahathir Mohamad mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menggunakan RM 10 miliar untuk membiayai proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut 23,5%, produksi menyusut 9%, dan agrikultur 5,9%. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara ini turun 6,2% pada 1998. Meskipun ikut mengalami dampak negatif krisis finansial Asia 1997, Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini karena menolak bantuan IMF.

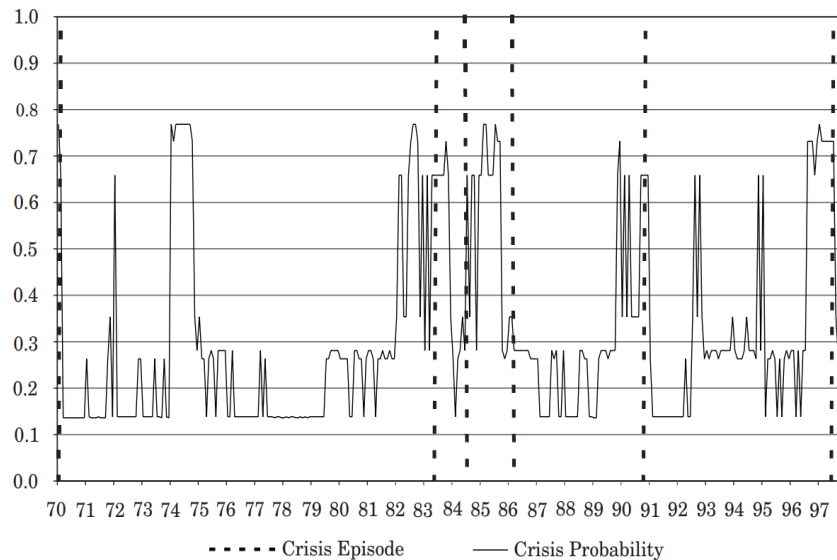


Figure 4. Philippines: Currency Crisis and Probability of Currency Crisis 1970-1995 (in-sample), 1996-1997 (out sample)

Sumber: (Zhuang & Dowling, 2002)

Dalam **figure 4** menunjukkan bahwa ketika Baht Thailand terdepresiasi sebesar 19,6% maka Filipina tidak begitu terpengaruh oleh krisis tahun 1997. Namun, grafik tersebut menunjukkan beberapa kerentanan keuangan di negara ini sejak pertengahan 1996. Probabilitas krisis meningkat secara dramatis dari pertengahan 1996 yakni lebih tinggi dari 70% hingga Juli 1997 tepatnya ketika peso terdepresiasi sekitar 9%. Krisis di Thailand membawa pengaruh di Filipina. Bank sentral Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75% pada Mei 1997 dan 2% lagi pada 19 Juni 1997. Pada 3 Juli, bank sentral Filipina dipaksa IMF untuk campur tangan dalam menjaga kestabilan peso Filipina, kemudian bank sentral Filipina mengikuti perintah IMF dengan menaikkan suku bunga dari 15% ke 24% hanya dalam waktu satu malam saja (li & Keuangan, 2007).

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Anjloknya Kurs Baht Thailand

Nilai mata uang sebuah negara terhadap dolar dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, belajar dari negara Thailand saat dilanda krisis ekonomi di tahun 1997 kemudian menyebabkan inflasi yang besar ke negara Asia lainnya. Krisis moneter dalam upaya kebijakan Thailand dengan menaikkan bunga dengan tujuan menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi yang terjadi. Pemerintah terpaksa menguras cadangan devisa negara untuk mempertahankan nilai tukar Baht. Namun sayangnya, usaha pemerintah ini sia-sia dan justru menyebabkan semakin melemahnya nilai tukar Baht terhadap dolar. Krisis ini menyebabkan terjadinya arus keluar modal (*capital flight*), penutupan sejumlah bank akibat terjadi *rush*, sehingga memaksa negara Thailand dan Indonesia untuk mengucurkan dana sebesar Bt. 300 miliar (sekitar USD 5,5 miliar- kurs akhir tahun 1998) dan Indonesia harus mengeluarkan *bailout* (dana talang) sebesar Rp 144,5 triliun (disebut BLBI, yang kemudian membengkak menjadi Rp 600 triliun bila ditambah beban bunga hingga tahun 2030) (Sandra, 2018). Krisis tersebut menetapkan nilai mata uang mengambang, sehingga mengalami kemerosotan terhadap nilai mata uang dolar. Beberapa upaya pemerintah Thailand dalam memperbaiki krisis ekonomi tersebut diantaranya:

Penerapan *Austerity Fiscal*

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, hal tersebut mendorong pemerintah Thailand meminta bantuan kepada IMF dengan tujuan memperbaiki perekonomian Thailand. IMF (*International Monetary Fund*) adalah badan institusi moneter internasional dengan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menangani segala macam isu dan permasalahan yang ada dalam sistem ekonomi politik Internasional juga melakukan upaya berupa intervensi terhadap situasi krisis perekonomian di negara Thailand melalui peningkatan atas nilai tukar mata uang negara negara yang mengalami krisis finansial (Seta, 2017).

IMF mencoba menawarkan solusi dengan *Austerity fiscal* atau pengetatan anggaran dalam artian serangkaian kebijakan yang ditetapkan pada pemerintah yang mempunyai tujuan mengurangi nilai defisit anggaran. *Austerity fiscal* adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh IMF ketika suatu negara sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan (Fakta, 2017). Intervensi dari IMF merupakan hal yang penting guna menstabilkan perekonomian di Thailand. IMF menawarkan program-program yang secara perlahan membantu Thailand dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pemerintah Thailand harus mampu melihat dampak yang terjadi, apakah berdampak baik atau buruk dalam perbaikan ekonomi Thailand, khususnya dalam sektor domestik. Salah satunya dengan penerapan program *austerity fiscal*, adanya penutupan bank, pemotongan pengeluaran, dan kenaikan suku bunga memberikan pengaruh buruk terhadap kestabilan ekonomi yang ada di Thailand. Kebijakan tersebut memberikan sebuah *gap* atau kesenjangan bagi kaum kaya dan miskin. Program pengetatan anggaran ini diterapkan oleh Pemerintah Thailand. Namun sebagian pihak justru menganggap bahwa program ini hanya menguntungkan pihak kaya saja dan mengabaikan kaum miskin (Lumanauw, 2017).

Usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem perawatan kesehatan, sistem pendidikan, dan industri manufaktur ternyata masih jauh dari keinginan yang diharapkan. Pada kenyataannya, ekonomi Thailand malah semakin anjlok dan membuat kondisi dalam negeri semakin memburuk. Dalam hal ini, pemerintah perlu menata ulang kebijakan yang akan dipakai supaya keseimbangan antara kaum kaya dan miskin dapat terkendali.

Penerapan *Letter of Intent (LoI)*

Letter of Intent (LoI) ditandatangani oleh Thailand yang mana pada tanggal 14 Agustus tahun 1997 menjadi *Letter of Intent* pertamanya. Dewan IMF menyetujui untuk memberikan bantuan sebesar SDR 2,9 milyar (SDR = kelompok mata uang cadangan), atau dalam USD 4 miliar dari kuota yang ada pada waktu itu di Thailand, yang ditetapkan selama periode 34 bulan (Camdessus, 1997). Isi dari LOI tersebut adalah kebijakan rancangan yang dijadikan patokan dalam menstabilkan ekonomi Thailand. Secara spesifiknya, kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Thailand pada tahun pertamanya harus fokus menyelesaikan pasar pertukaran, reformasi sektor keuangan, dan kebijakan fiskal dengan tujuan menstabilkan perekonomian. Kebijakan tersebut dipercaya dapat mengembalikan kepercayaan pasar ke tingkat tinggi yang berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga akan melakukan penutupan terhadap lembaga keuangan yang memiliki kinerja lemah dan rekapitalisasi terhadap sistem perbankan.
- 2) Upaya menyeleksi ulang defisit sektor publik dalam 1% dari anggaran dan memperbesar sektor pinjaman.

- 3) Kerangka kerja baru dalam membuat kebijakan uang ketat, sehingga arus modal yang keluar lebih sedikit dan menstabilkan nilai tukar mata uang.
- 4) Memanfaatkan peran sektor swasta dalam reformasi pelayanan publik guna menarik modal asing (Aziza et al., 2019).

Selanjutnya IMF memberikan kebijakan untuk membuka perekonomian pada modal asing, timbal balik dari pemerintah dengan menerapkan suku bunga di atas 2% dan menutup institusi-institusi keuangan. Namun, karena adanya tekanan dari NGO (*Non Government Organizations*) dan pihak kaum bisnis, timbul spekulasi yang menganggap program yang diberikan IMF mengabaikan kepentingan kaum buruh dan hanya ditujukan pada kelompok pebisnis saja. Hal tersebut menyebabkan pada Lol yang keempat, pemerintah hanya berfokus pada membuang penghematan dan meminimalisir penurunan ekonomi, serta berusaha mencapai pemulihan tahap awal. Beberapa waktu kemudian terlihat bahwa Lol Thailand memberikan perkembangan yang baik, hingga pada Lol yang ketujuh dan kedelapan Thailand memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 menjadi 3-4%.

Dengan adanya program-program dari IMF tersebut sangat memberikan pengaruh yang baik bagi perbaikan ekonomi Thailand. Sejak pertengahan tahun 2000, Thailand sudah tidak pernah menarik dana IMF lagi dari keuangan resmi sebanyak 17,2 miliar dolar. 14,3 miliar dolar lainnya didapat dari penarikan kontributor bilateral dan multilateral, meski sebagiannya juga masih ditarik dari IMF (Aziza et al., 2019). Adapun faktor yang membuat perekonomian Thailand dapat membaik yaitu Thailand lebih mendekatkan pada sektor riil, dengan didukung oleh kondisi politik yang terinstitusionalisasi dengan baik. Kebijakan yang dibuat pun berfokus untuk merubah ke berbagai sektor, utamanya pada sektor keuangan.

4. CONCLUSION

Krisis moneter pada tahun 1997 berawal dari maraknya "*hot money bubble*" atau gelembung uang panas. Uang panas ini merupakan dana yang pengelolaannya bersifat untung-untungan dan dapat memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Uang panas ini dapat menarik perhatian investor untuk mengunci suku bunga jangka pendek dengan bunga tertinggi. Adanya *hot money bubble* tersebut membantu banyak negara-negara di Asia dalam meningkatkan pertumbuhannya, karena banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi. Pada tahun 1980 hingga 1990, terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di Asia sebanyak 8-12%. Namun, *hot money bubble* ini memberikan dampak yang sangat besar dan pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi di negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara (Yilmaz, 2000).

Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan dengan stabil dimana memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 9% per tahun. Karena stabilnya perekonomian Thailand secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah memberikan kredit ke perusahaan-perusahaan di Thailand. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan-perusahaan itu jatuh. Pasar modal Thailand pun ikut anjlok hingga 75%. Setelah itu, dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997, krisis ini juga mengakibatkan uang Baht Thailand pada tahun 1997 mengalami depresiasi. Depresiasi Baht Thailand ini diakibatkan oleh ulah para spekulan. Spekulan menjual mata uang Baht dengan harapan dapat menurunkan harga Baht yang berharga 26 Baht per 1 Dollar Amerika. Pemerintah Thailand harus membeli mata uang Baht dan menghabiskan cadangan devisa sebesar USD 6,8 juta. Pada Januari 1998, harga Baht jatuh dengan harga 54 Baht per Dollar Amerika, Baht Thailand juga dipicu oleh adanya penurunan tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan Eropa yang membuat terjadinya peningkatan tajam arus modal yang masuk di Asia. Thailand kehilangan momentum ekspor sehingga defisit

dalam *balance of payment* mengakibatkan depresiasi drastis nilai Baht pada tahun 1997. Jatuhnya nilai Baht Thailand pada tahun 1997 menjadi awal dari momentum krisis finansial di negara-negara Asia. Krisis Asia membawa wabah terhadap jatuhnya mata uang, serta melemahnya pasar modal di negara-negara tetangganya seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani anjloknya kurs baht thailand diantaranya ada penerapan *Austerity Fiscal* dan penerapan *Letter of Intent* (LoI).

5. REFERENCES

- Astriyani, W., & Rinardi, H. (2022). Hubungan Letter of Intent (LoI) international monetary fund dan perkembangan ekonomi khususnya sektor perbankan Indonesia (1997-2006). *Historiografi*, 2(2), 118-127.
- Aziza, A. N., Fathana, A., & Yulianto, A. F. (2019). Analisis peran imf terhadap fenomena inflasi tahun 1997-1998 di negara thailand. *Nation State Journal of International Studies*, 2(1), 25–34. <https://doi.org/10.24076/nsjis.2019v2i1.143>
- Berg, A. (1999). The asia crisis: causes, policy responses and outcomes. In *IMF Working Papers* (Vol. 99, Issue 138, p. 1). <https://doi.org/10.5089/9781451855968.001>
- Firmansya, M.W. & Nuzula, N. F. (2017). *Pengaruh rasio inflasi dan suku bunga indonesia relatif terhadap amerika serikat pada nilai tukar rupiah (implementasi purchasing power parity international fisher effect)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 47 No. 2.
- Helmi, H. (2011). Aplikasi Peramalan Kurs Valuta Asing Rupiah per Dollar Amerika Serikat dengan Menggunakan Metode Box-Jenkins (ARIMA). *TINGKAP*, 7(1).
- Hidayah, E. N., Zainuri, & Hanim, A. (2018). *Pengujian efek fisher internasional: studi kasus indonesia dan china*. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume V (1): 26-30.
- Iriansyah, H. S. (2020). Krisis asia, kapitalisme dan negara kesejahteraan (tinjauan analisis kapitalisme korea selatan). *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 53–60. <https://doi.org/10.37640/jip.v12i1.277>
- Jansen, K. (2001). *Thailand, financial crisis and monetary policy*. *Journal of the Asia Pacific Economy*. 6(1) 2001: 124-152. DOI: 10.1080/1354786002002456 7
- Joyce, J. P. (2000). The Asian Crisis and the IMF: New Problems, Old Solutions?. *The Journal of the Korean Economy*, 1(1).
- Kaloka, Y. N., Tegar, P., & Eldy, M. (2019). Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF. *Nation State: Journal of International Studies*, 2(1), 44-56.
- Khoirati, S. D. (1999). Jepang dan ketahanan ekonomi regional asia pasca krisis. In *Jepang Dan Ketahanan Ekonomi Regional Asia Pasca Krisis* (Vol. 4, Issue 2, pp. 53–71).
- Mahmudy, M. (2003). Setahun krisis asia : beberapa pelajaran yang dapat diambil dari krisis tersebut. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 1(2), 185–201. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i2.170>

- Raz, A. F., Indra, T. P., & Artikasih, D. K. (2012). Krisis keuangan global dan pertumbuhan ekonomi: Analisa dari perekonomian Asia Timur. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 15(2), 37-56.
- Rodier, L. (2014). Assessing the role of the IMF in South Korea during the Asian financial crisis. *Journal of Economics*, 2(2), 107-113.
- Tahirou, Y. S. (2013). The Role of the International Monetary Funds (IMF) in the East Asian Debt Crisis of 1997. *Journal of Undergraduate Research at Minnesota State University, Mankato*, 13(1), 9.
- Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1(4), 1-25.
- Utami, S. P. (2018). Hubungan Dan Pengaruh Antara Tingkat Suku Bunga Deposito, Nilai Investasi (Pma) Terhadap Kurs Dollar Amerika Sebelum Dan Setelah Krisis Moneter Tahun 1997. *Jurnal Ilmiah Widya*, 4(3).
- Panahi, O. P. (2016). *The asian financial crisis of 1997-1998 revisited: causes, recovery, and the path going forward*. DOI: 10.13140/RG.2.1.3147.1768
- Valentine, R. H. (2019). Dinamika Kerjasama Jepang dalam Bidang Bantuan Ekonomi dan Investasi Terhadap Negara-Negara ASEAN: Studi Perbandingan Kerjasama Jepang dengan Indonesia dan Thailand. *JURNAL KAJIAN*, 3(1), 73.
- Zhuang, J., & Dowling, J. M. (2002). Causes of the 1997 Asian financial crisis: What can an early warning system model tell us? *ERD Working Paper Series*, 26, 1–21.